



Kebijakan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Subang

Zaenal Hirawan¹

Magister Ilmu Administrasi, Universitas Subang
hirawan.zainal@gmail.com

Dini Rizky Fitriani²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Subang
dinifitriani0213@gmail.com

Hera Haniati³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Subang
herahaniati01@gmail.com

Abstract

Job market information (IPK) is one of the needs of the community, especially the workforce, in obtaining job opportunities. Public accessibility to this information is crucial, and the government plays a key role in facilitating this policy. This research focuses on the social and economic conditions of the community, which are crucial elements in supporting the implementation of labor market information policies. The results indicate that labor market information has not been able to reduce the unemployment rate in Subang Regency, as evidenced by the highly fluctuating unemployment figures. The government is working to provide the Subang Job Center platform, hoping to increase community participation in the workforce, although this information requires specific education and skills. The government acts as a facilitator between the community and the business world, ensuring the clarity of the information provided. Consistency of information provided by implementers to the public is also key to the success of labor market information policies. Educational support can also influence the types of job openings available. However, the relatively high poverty rate is also an equally important factor in labor force participation in Subang Regency.

Keywords: *policy implementation, labor job market information*

Abstrak

Informasi pasar kerja (IPK) merupakan salah satu kebutuhan dari masyarakat terutama angkatan kerja dalam memperoleh kesempatan kerja. Tentunya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut menjadi hal penting dan pemerintah menjadi salah fasilitator dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung terwujudnya kebijakan informasi pasar kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi pasar kerja belum dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Subang, terlihat dari jumlah pengangguran yang sangat fluktuatif. Pemerintah berupaya dengan menyediakan platform *Subang Job center* diharapkan partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja semakin meningkat, walaupun informasi tersebut mempunyai kriteria pendidikan dan keahlian tertentu. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator antara masyarakat dengan dunia usaha, sehingga pemerintah juga memastikan informasi yang disampaikan benar-benar jelas. Konsistensi informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada masyarakat

juga menjadi kunci dalam keberhasilan kebijakan informasi pasar kerja. Daya dukung tingkat pendidikan juga dapat menjangkau jenis lowongan pekerjaan yang dapat disediakan. Namun tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Subang

Kata Kunci: implementasi kebijakan, informasi pasar kerja

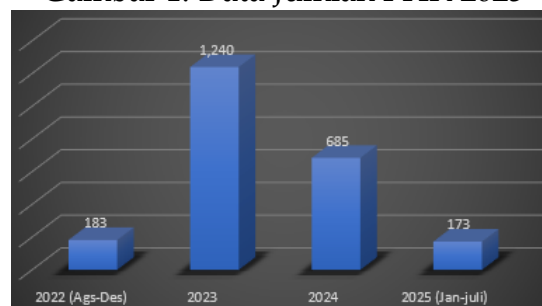
Pendahuluan

Informasi pasar kerja merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan perizinan melalui pendekatan Omnibus Law dengan mereformasi banyak undang-undang dan pasal secara bersamaan. Di lain pihak dalam Perda Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mengatur pentingnya pengelolaan data tenaga kerja secara terstruktur dan efisien melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Informasi yang disediakan mencakup berbagai elemen penting seperti lowongan pekerjaan yang tersedia, persyaratan kualifikasi, jenis pekerjaan yang dibutuhkan, dan lokasi pekerjaan. Data tersebut harus tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, baik secara offline melalui pusat layanan informasi, maupun online melalui platform digital yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi. Sistem informasi yang dikelola secara baik ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan informasi di pasar tenaga kerja, memfasilitasi pencarian kerja yang lebih cepat, dan menghubungkan tenaga kerja dengan industri yang membutuhkan.

Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 344 Tahun 2022 menambah lapisan dalam pengelolaan informasi pasar kerja di tingkat kabupaten. Dalam peraturan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Subang diamanatkan untuk mengelola data pasar kerja secara komprehensif dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi akses bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui layanan konsultasi dan pendampingan dalam mencari pekerjaan, serta pemberian informasi mengenai pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kualitas keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar

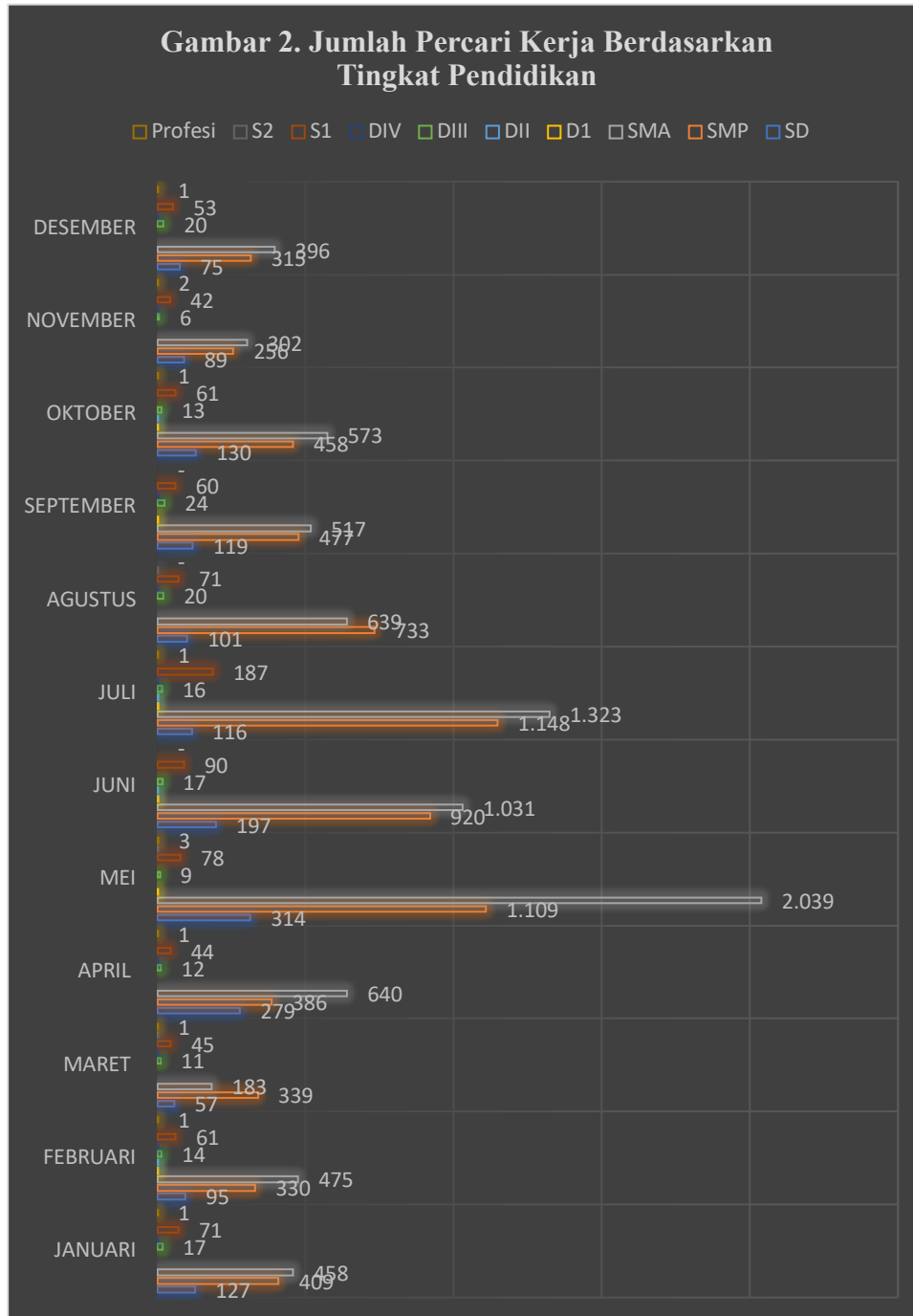
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Masyarakat

Gambar 1. Data Jumlah PHK 2025



Sumber: Dinsnaker Subang, 2025

Kabupaten Subang sebagai salah satu wilayah yang juga terdampak dinamika ketenagakerjaan nasional, memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan informasi pasar kerja. Efektivitas implementasi kebijakan ini sangat menentukan bagaimana masyarakat, khususnya para pencari kerja, dapat merespons perubahan dan peluang yang ada di pasar kerja lokal, regional, maupun nasional (da Paixão Soares Pereira & Hakim, 2015a; Ervanto et al., 2022; Muhyiddin et al., 2022)



Sumber: Disnakertrans ESDM Kabupaten Subang, 2025 (Diolah Peneliti)

Ketimpangan dalam distribusi lapangan pekerjaan juga turut memperburuk fenomena ini, di mana banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai

dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja (Ervanto et al., 2022; Trimawarni et al., 2024). Kurangnya penyesuaian antara pelatihan keterampilan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan tenaga kerja yang lebih produktif. Bahkan, sektor-sektor yang tumbuh pesat cenderung lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Subang. Di sinilah peran penting Informasi Pasar Kerja (IPK) menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi mengenai lowongan pekerjaan, persyaratan, dan kualifikasi yang dibutuhkan tersebar secara merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada faktor ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya berfokus pada respon masyarakat dalam lowongan pekerjaan (da Paixão Soares Pereira & Hakim, 2015; Trimawarni et al., 2024), sementara penelitian yang lain berfokus pada kesesuaian lapangan pekerjaan dengan tingkat keahlian (Ervanto et al., 2022).

Metode Penelitian

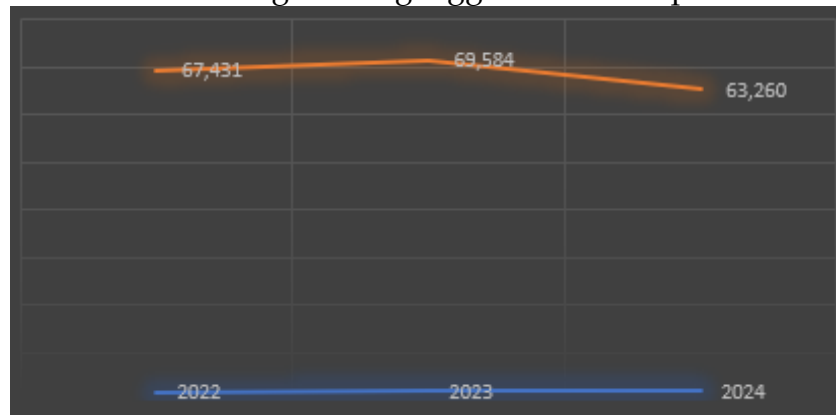
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. (Hafni Sahir, 2022)

Hasil dan Pembahasan

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena mereka memberikan arah yang jelas bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan program-program yang dirancang. Informasi pasar kerja merupakan bagian penting sebagai bentuk jembatan dari para pencari dengan tempat kerja. Melalui model seperti ini, pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja, tempat pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis lowongan pekerjaan. Pemerintah juga membantu masyarakat dalam proses penyediaan kartu pencari kerja (AK1) dalam pemenuhan syarat administratif. Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai dampak atas berlakunya kebijakan informasi pasar kerja dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Tren Tingkat Pengangguran di Kabupaten Subang



Sumber: Subang dalam angka 2025 (diolah peneliti)

Jika melihat gambar di atas Tingkat pengangguran di Kabupaten Subang dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami fluktuatif. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut, yang pertama yaitu turn over karyawan pada dunia industry dengan berbagai alasan. Kondisi lain yaitu banyak lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Tingkat Pendidikan dan kemampuan dari para pencari kerja. Kondisi lain juga yaitu para pencari kerja mencari lapangan pekerjaan di luar Kabupaten Subang dan tidak melaporkan Ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Untuk dapat melihat Tingkat persebaran jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 4. Tren Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Subang 2025



Sumber: Subang dalam Angka 2025 (diolah peneliti)

Jika melihat gambar di atas jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai trend masing-masing dari tahun ke tahun. Untuk laki-laki dari tahun 2022 ke tahun 2023 tingkat pengangguran mengalami peningkatan 11,6% sementara untuk Perempuan sebaliknya yaitu penurunan 28%. Sementara untuk tahun 2023, laki-laki mengalami penurunan sebesar 52,7% sementara Perempuan mengalami peningkatan sebesar 45,4%. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa informasi pasar kerja khususnya di Kabupaten Subang belum dapat menjawab semua kebutuhan pasar kerja. Selain Pemerintah, pihak swasta (dunia Industri) mempunyai peran besar dalam pelaksanaan kebijakan ini. Karena mereka/ dunia industry merupakan salah satu pengguna dari para calon tenaga kerja. Bentuk kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan atau program ini merupakan bagian

penting dalam mengurangi Tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten Subang. Diharapkan dengan adanya Kerjasama dan komitmen dari pelaksana kebijakan dari pihak pemerintah, swasta, serikat buruh dan Masyarakat menjadi jembatan dalam mengurangi Tingkat pengangguran yang semakin tinggi (da Paixão Soares Pereira & Hakim, 2015b)

b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan/ program, sumber daya merupakan bagian penting. Sumber daya tersebut baik dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dalam mendukung kebijakan informasi pasar kerja. Dalam hal keuangan, tentu saja pemerintah menyediakan dana sebagai bentuk stimulus kepada para calon tenaga kerja. Karena setiap program pemerintah tentu saja memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan kepada calon tenaga kerja, merupakan salah satu upaya atau bentuk dukungan dari pemerintah kepada masyarakat pencari kerja. Namun sumber daya fasilitas merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam informasi pasar kerja. Di era yang serba cepat, maka pemerintah juga harus dapat merespons atas kebutuhan tersebut. Artinya, pemerintah menyediakan akses informasi melalui system yang dapat dilihat oleh siapa saja, kapan dan Dimana saja.

Pemerintah Kabupaten Subang meluncurkan satu bentuk aplikasi SJC (*Subang Job Center*) dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat akan informasi lowongan pekerjaan pada industry-industri di Kabupaten Subang. Aplikasi tersebut sekurang-kurang dapat memberikan informasi, pemahaman dan panduan awal ketika ingin mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan berdasarkan kriteri keahlian dan pendidikan. Walaupun aplikasi tersebut belum dapat terukur tingkat keberhasilan dalam menjangkau dan memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seyogiya diperlukan komunikasi yang baik, karena melibatkan banyaknya aktor dalam kebijakan informasi pasar kerja. Terutama internal pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sekaligus komunikasi eksternal dengan pihak swasta/ dunia usaha/ dunia industry. Komunikasi yang berjalan selama ini dalam bentuk meneruskan informasi dari dunia usaha kepada Masyarakat. Sehingga pemerintah sebagai bentuk jembatan informasi antara kedua belah pihak. Pihak yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan pihak yang akan menerima pekerja sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditentukan. Sementara media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut sangat beragam, tentunya melibatkan media social yang lebih cepat menggampai Masyarakat secara luas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian bahwa media social dapat mempercepat proses penyebaran informasi lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja (Khan & Zubakhrum Tjenreng, 2023).Walaupun terkadang para pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar Kabupaten Subang jarang melaporkan kepada pihak pemerintah.

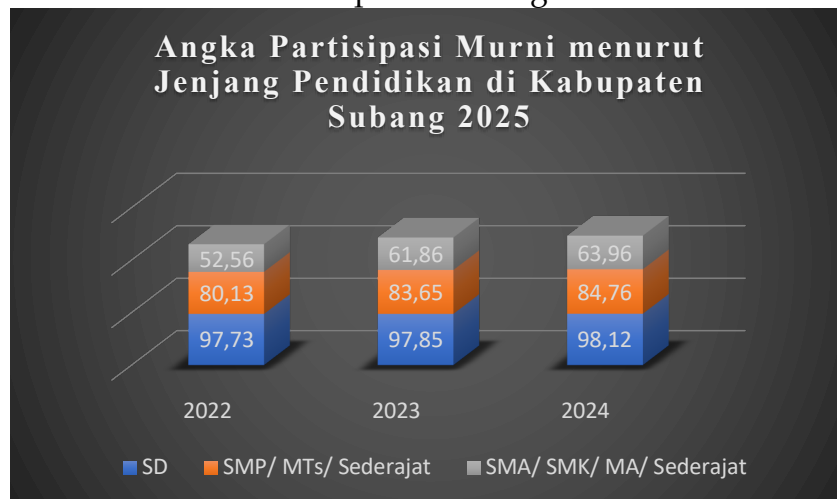
d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pemerintah dalam hal ini berusaha sebisa mungkin bersikap professional dalam melaksanakan suatu kebijakan. Tentunya dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangan yang dilakukan para implementornya. Pemerintah menjadi salah satu fasilitator dalam informasi pasar kerja, selain itu juga mendukung proses administratifnya. Pemerintah menyediakan kelengkapan para pencari kerja dengan kartu pencari kerja (AK1), membekali dengan bentuk-bentuk pelatihan, sekaligus menyebar luaskan informasi dari lowongan pekerjaan. Model-model seperti ini yang diharapkan bahwa para pencari kerja dapat diserap langsung oleh dunia usaha, ataupun sekurang-kurangnya para pencari kerja sudah mendapatkan pelatihan yang dapat dikembangkan dan diterapkan pada usaha sendiri (Khan & Zubakhrum Tjenreng, 2023)

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi social, ekonomi dan politik juga dapat menentukan Tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Dalam hal ini daya dukung dari kondisi sosial masyarakat yaitu angka partisipasi murni jenjang Pendidikan. Angka ini dapat mendeskripsikan Tingkat Pendidikan akhir yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Subang. Untuk dapat melihat angka partisipasi murni sekolah pada jenjang Pendidikan di Kabupaten Subang dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 5. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Subang 2025

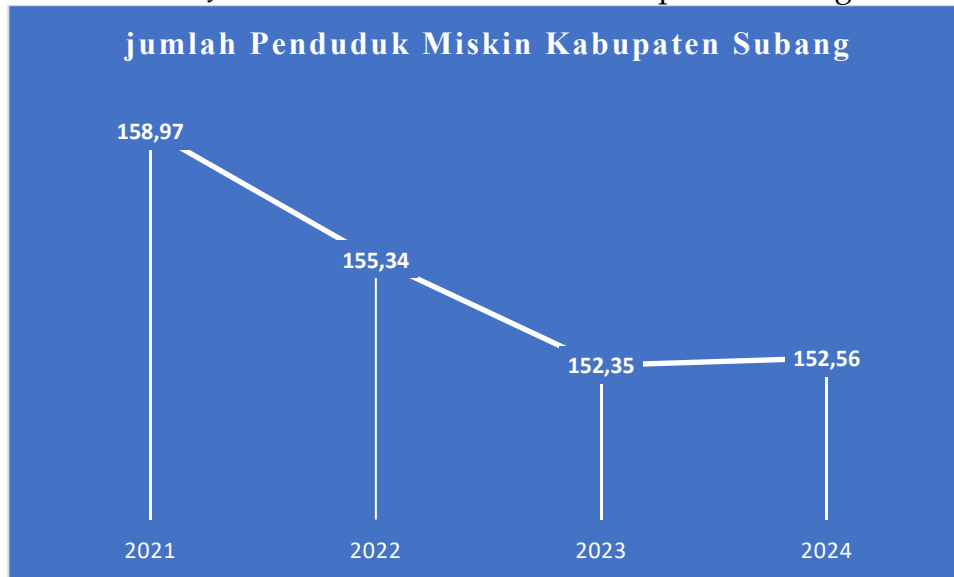


Sumber: Subang dalam Angka 2025 (diolah Peneliti)

Berdasarkan gambar di atas, angka partisipasi murni pada jenjang Pendidikan mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 relatif meningkat. Hal ini tentu saja memberikan daya dukung dari masyarakat untuk mendapatkan posisi/ kesempatan kerja pada tingkat pendidikan SMA/ SMK/ sederajat. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang mempunyai angka 63,96 diharapkan mempunyai peluang besar dalam memperoleh lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Dengan meningkatnya APM Masyarakat tentu saja pemerintah berharap bahwa masyarakat Subang dapat menikmati hasil

pembangunan khususnya pembangunan bidang industri. Sementara tidak hanya APM saja yang dapat menentukan/ mendukung dalam kebijakan informasi pasar kerja, salah satunya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Subang. Karena jumlah Masyarakat miskin juga dapat menentukan distribusi pendapatan, distribusi Pendidikan dan distribusi Kesehatan. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah Masyarakat miskin dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Subang 2025



Garis kemiskinan di Kabupaten Subang pada tahun 2024 yaitu Rp 434.161, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu Rp 404.320. Kondisi ini menjadi kontradiktif dari distribusi pendapatan melalui pekerjaan. Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang pada tahun 2024 sebanyak 152,56 ribu orang atau sebesar 9,49% dari penduduk Kabupaten Subang. Jumlah ini tentu saja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 152,35 ribu atau 9,52%. Dengan adanya kebijakan informasi pasar kerja, Masyarakat dapat mengakses pekerjaan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan tidak menambah gap/ kesenjangan pendapatan.

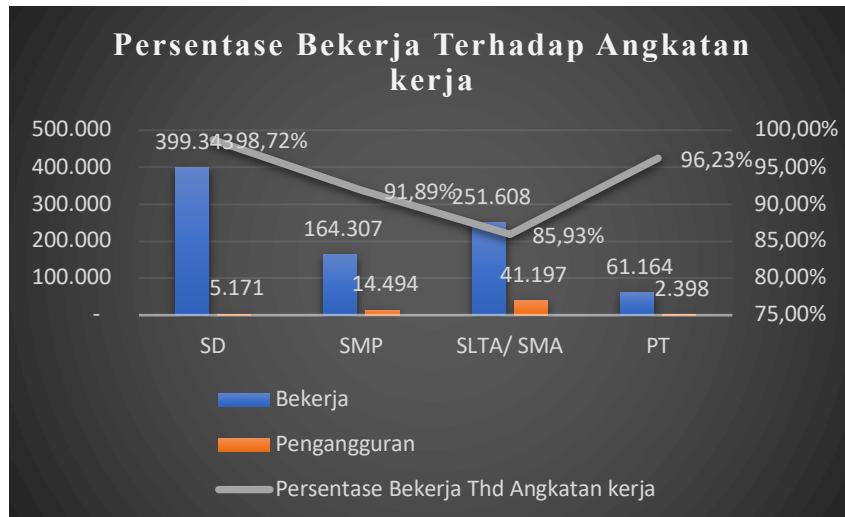
Kondisi kemiskinan ini, tidak semata-mata diakibatkan oleh gagalnya informasi kerja, tetapi juga Masyarakat yang tidak menjangkau pekerjaan tersebut dengan berbagai faktor. Faktor Pendidikan, keahlian, pengalaman bekerja pada bidang yang sama, Bahasa asing dan faktor lain. Artinya dengan adanya informasi pasar kerja, diharapkan Masyarakat ikut berpartisipasi langsung dalam Angkatan kerja sehingga meningkatkan nilai ekonomi keluarga dan menambah pengeluaran pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan investasi lainnya.

f. Disposisi Implementor

Pemerintah memastikan bahwa informasi yang disebarluarkan kepada masyarakat merupakan informasi yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas informasi yang tidak jelas, baik pihak pemerintah, masyarakat ataupun pihak industri. Selain itu,

informasi yang disampaikan juga menjadi tepat sasaran. Karena informasi ini menjadi salah satu daya tarik dari Masyarakat kepada dunia industry. Tentu saja informasi pasar kerja menjadi salah satu bentuk tingkat partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja.

Gambar 7. Persentase Bekerja Terhadap Angka Kerja



Sumber: Subang dalam angka tahun 2025 (diolah Peneliti)

Berdasarkan gambar di atas jelas bahwa Tingkat Pendidikan SD memiliki persentase tertinggi terhadap angkatan kerja. terlepas pekerjaan yang didapatkan merupakan pekerjaan yang bersifat kasar juga harian lepas. Untuk jenis pekerjaan yang bersifat harian lepas tentu saja jarang memerlukan informasi pasar kerja. Karena informasi pasar lebih lebih memiliki karakteristik dengan tingkat pendidikan SLTP, SMA bahkan lulusan Perguruan Tinggi. Walaupun dari sisi kuantitas bahwa semakin tinggi Tingkat Pendidikan, jumlah yang bekerja lebih sedikit bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang dibawah nya.

Kesimpulan

Kebijakan informasi pasar kerja di Kabupaten Subang belum dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dengan dunia usaha. Hal ini dapat digambarkan dengan pencari kerja mendapatkan informasi langsung dari perusahaan, ataupun pihak terdekat dengan pencari kerja. Jenis pekerjaan yang disampaikan/ diinformasikan kepada masyarakat mempunyai kriteria tertentu sehingga tidak dapat mencakup dari semua level pendidikan dan usia. Disisi lain, pemerintah tetap berusaha menjawab kebutuhan akan kecepatan informasi melalui *subang job center (SJC)*. Diharapkan dengan adanya media, informasi yang tersebar lebih cepat, tepat dan menjangkau semua elemen masyarakat.

Referensi

- da Paixão Soares Pereira, A., & Hakim, A. (2015). *IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PASAR TENAGA KERJA (SISTEMA INFORMASAUN MERKADU TRABALHU)*. 4(2), 262. www.publikasi.unitri.ac.id
- Ervanto, R. A., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI*. 1(2), 338–355. <https://bekasisociety.com/2020/12/16/>
- Hafni Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Khan, S., & Zubakhrum Tjenreng, M. B. (2023). Implementasi Kebijakan Bogor Kerja dalam Pelayanan Ketenagakerjaan di Kota Bogor. *Jurnal Inovasi Global*, 3(9). <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/index>
- Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Y., Warsida, R. Y., & Yani, R. A. A. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123>
- Trimawarni, A., Aviani, N., Listiana, Y. D., & Pontianak, P. N. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI BURSA KERJA ONLINE DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION TRANSPARENCY POLICY IN THE ONLINE JOB MARKET IN PONTIANAK CITY*. 29(2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Perda Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 344 Tahun 2022 mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang